

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasari untuk dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik, yang salah satunya adalah Catatan Atas Laporan Keuangan, dengan demikian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Nganjuk. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana uraian di bawah ini.

1.1.1 Maksud

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 yang dapat dimanfaatkan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.1.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk :

- a. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan dana APBD Tahun 2023
- b. untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;

- c. Menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya keuangan yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- d. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran dana pemerintah yang ada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
- e. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk;
- f. Menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.2 Landasan Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan-Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 tahun 2020;
- 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

14. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 37 tahun 2023 tentang perubahan ketiga Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2023 tentang tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2023 tentang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

1.3 Sistematika Penulisan

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan-

1.1.1 Maksud

1.1.2 Tujuan

1.2 Landasan Hukum

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing – masing pos – pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 Pendapatan – LRA

3.1.2 Belanja

3.1.3 Pendapatan - LO

3.1.4 Beban

3.1.5 Aset

3.1.6 Kewajiban

3.1.7 Ekuitas Dana

BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

BAB V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2021

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Ikhtisar realisasi pencapaian kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk untuk masing-masing program adalah sebagai berikut:

A. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

➤ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Hasil program ini adalah Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun, melalui kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini menyerap dana sebesar **Rp29.720.000,00** atau **85,76%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp34.653.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp34.653.000,00	Rp29.720.000,00	85,76
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp9.900.000,00	Rp9.433.000,00	95,28
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp12.864.000,00	Rp9.390.000,00	72,99
3.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp11.889.000,00	Rp10.897.000,00	91,66

➤ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Hasil program ini adalah Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun, melalui kegiatan:

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Program ini menyerap dana sebesar **Rp4.172.758.330,00** atau **72,19%** dari anggaran Tahun 2022 sebesar **Rp5.405.801.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.405.801.000,00	Rp4.172.758.330,00	72,19
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.375.841.000,00	Rp4.145.620.330,00	77,12
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp9.770.000,00	Rp7.490.000,00	76,66
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp20.190.000,00	Rp19.648.000,00	97,32

➤ **Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah**

Hasil program ini adalah Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun, Program ini menyerap dana sebesar **Rp5.666.800,00** atau **98,81%** dari anggaran Tahun 2021 sebesar **Rp5.735.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 5.735.000,00	Rp5.666.800,00	98,81%
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp5.735.000,00	Rp5.666.800,00	98,81%

➤ **Administrasi Umum Perangkat daerah**

Hasil program ini adalah Terselenggaranya Administrasi Umum dan Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Sub Bagian Umum yang Dilaksanakan , Program ini menyerap dana sebesar **Rp444.195.448,00** atau **94,63%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp469.409.620,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp469.409.620,00	Rp444.195.448,00	Rp 94,63
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.993.220,00	Rp5.951.950,00	99,31
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp105.848.000,00	Rp105.420.150,00	99,60
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp48.645.900,00	Rp44.373.500,00	91,22
4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp28.037.500,00	Rp28.024.445,00	99,95
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp280.885.000,00	Rp260.425.403,00	92,72

➤ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Hasil program ini adalah Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan melalui kegiatan:

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program ini menyerap dana sebesar **Rp417.940.000,00** atau **95,10%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp439.490.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp439.490.000,00	Rp417.940.000,00	95,10%
1.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp439.490.000,00	Rp417.940.000,00	95,10%

➤ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Hasil program ini adalah Presentase penyediaan jasa Penunjang Perangkat Daerah melalui kegiatan:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Program ini menyerap dana sebesar **Rp185.401.118,00** atau **85,55%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp216.720.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp216.720.000,00	Rp185.401.118,00	Rp 85,55
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.650.000,00	Rp3.605.100,00	98,77
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp199.800.000,00	Rp171.979.018,00	86,08
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp13.270.000,00	Rp9.817.000,00	73,98

➤ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Hasil program ini adalah Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat, melalui kegiatan:

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program ini menyerap dana sebesar **Rp595.143.060,00** atau **76,63%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp776.653.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp776.653.000,00	Rp595.143.060,00	Rp 76,63
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp393.144.950,00	Rp311.186.763,00	79,15
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp318.611.500,00	Rp221.123.212,00	69,40
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp64.896.550,00	Rp62.833.085,00	96,82

B. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

➤ Penyusunan Prencanaan dan Pendanaan

Hasil program ini adalah % outcome Program Pembangunan Daerah dengan Predikat Tercapai, melalui kegiatan:

1. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini menyerap dana sebesar **Rp781.440.358,00** atau **98,36%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp794.462.550,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penyusunan Prencanaan dan Pendanaan	Rp794.462.550,00	Rp781.440.358,00	98,36
1.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp794.462.550,00	Rp781.440.358,00	98,36

➤ Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil program ini adalah jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, melalui kegiatan:

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini menyerap dana sebesar **Rp49.474.500,00** atau **98,90%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp50.025.700,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp50.025.700,00	Rp49.474.500,00	98,90
1.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp50.025.700,00	Rp49.474.500,00	98,90

➤ Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil program ini Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan yang dievaluasi dan ditindaklanjuti.melalui kegiatan:

1. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Program ini menyerap dana sebesar **Rp65.924.516,00** atau **88,67 %** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp74.347.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp74.347.000,00	Rp65.924.516,00	88,67
1.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp74.347.000,00	Rp65.924.516,00	88,67

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

➤ **Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**

Hasil program ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia kegiatan:

1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Program ini menyerap dana sebesar **Rp345.907.196,00** atau **87,02 %** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp397.500.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp397.500.000,00	Rp345.907.196,00	87,02
1.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp97.500.000,00	Rp83.963.750,00	86,12
2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp300.000.000,00	Rp261.943.446,00	87,31

➤ **Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**

Hasil program ini adalah hasil koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) melalui kegiatan :

1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Program ini menyerap dana sebesar **Rp117.197.777,00** atau **93,06%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp125.933.650,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp125.933.650,00	Rp117.197.777,00	93,06
1.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp79.482.000,00	Rp74.107.077,00	93,24
2.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Rp46.451.650,00	Rp43.090.700,00	92,76

➤ **Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**

Hasil program ini adalah hasil koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melalui kegiatan :

1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Program ini menyerap dana sebesar **Rp195.139.592,00** atau **91,18%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp214.020.539,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp214.020.539,00	Rp195.139.592,00	91,18
1.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Rp114.392.539,00	Rp107.627.800,00	94,09

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
2.	Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Rp99.628.000,00	Rp87.511.792,00	87,84

C. Program Penelitian, Pengembangan dan Pengembangan Daerah

➤ Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Hasil program ini adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum

Program ini menyerap dana sebesar **Rp432.414.024,00** atau **96,09%** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp450.000.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp450.000.000,00	Rp432.414.024,00	96,09
1.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Rp450.000.000,00	Rp432.414.024,00	96,09

➤ **Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**

Hasil program ini adalah Jumlah Pemanfaatan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dilaksanakan , melalui kegiatan:

1. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata

Program ini menyerap dana sebesar **Rp116.791.740,00** atau **93,43** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp125.000.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rp125.000.000,00	Rp116.791.740,00	93,43
1.	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Rp125.000.000,00	Rp116.791.740,00	93,43

➤ **Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**

Hasil program ini adalah Jumlah kelitbangan bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dilaksanakan., melalui kegiatan:

1. Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
3. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
4. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Program ini menyerap dana sebesar **Rp276.418.720,00** atau **76,69** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp360.419.050,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp360.419.050,00	Rp276.418.720,00	76,69
1.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Rp163.580.800,00	Rp139.599.150,00	85,34
2.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp25.000.000,00	Rp7.554.000,00	30,22
3.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Rp115.088.250,00	Rp105.625.770,00	91,78
4.	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Rp56.750.000,00	Rp23.639.800,00	41,66

➤ **Pengembangan Inovasi dan Teknologi**

Hasil program ini adalah Jumlah inovasi dan teknologi daerah yang dikembangkan, melalui kegiatan:

1. Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
2. Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
4. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Program ini menyerap dana sebesar **Rp145.940.590,00** atau **57,91** dari anggaran Tahun 2023 sebesar **Rp252.000.000,00** dengan perincian sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp252.000.000,00	Rp145.940.590,00	57,91
1.	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp120.000.000,00	Rp90.809.696,00	75,67
2.	Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp 72.000.000,00	Rp35.159.394,00	48,83
3.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp30.000.000,00	Rp8.750.500,00	29,17
4.	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Rp30.000.000,00	Rp11.221.000,00	37,40

2.1. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya target kinerja keuangan secara utuh (100%) disebabkan adanya beberapa hambatan dan kendala, antara lain :

- a. Tidak Terlaksannaya FGD Permasalahan Pertanian dan Perkebunan.
- b. Fasilitasi Proses TMKH Sudah Beralih ke dinas PRKPP.
- c. Output Sub Kegiatan adalah Pelaporan Inovasi Melalui Aplikasi IGA, Penyerapan Anggaran yang dilaksanakan sudah cukup untuk mendukung pelaporan inovasi, namun demikian pada tahun berikutnya direncanakan akan dilakukan

Sosialisasi dan Bimtek untuk melaporkan Inovasi dari Kecamatan, Korwil Pendidikan dan Puskesmas.

- d. Kegiatan Kelitbangan Sebagian Besar di PAPBD sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan diseminasi Hasil Kelitbangan.
- e. Fasilitasi HKI direncanakan untuk pemenang lomba inovasi, Namun demikian penetapan pemenang lomba baru terlaksana pada bulan desember, sehingga tidak memungkinkan untuk fasilitasi HKI Nya.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing – masing pos – pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 Pendapatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk bukan merupakan SKPD penghasil, jadi pendapatan SKPD Bappeda Kabupaten Nganjuk adalah **Rp0,00**.

3.1.2 Belanja

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Bappeda Kabupaten Nganjuk yang memberi manfaat jangka panjang. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, seperti tabel berikut ini:

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	5.484.021.000,00	4.250.950.330,00	77,52	4.493.643.624,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.261.724.109,00	3.704.587.359,00	86,93	5.776.964.671,00
	Jumlah	9.745.745.109,00	7.955.537.689,00	81,63	10.270.608.295,00

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar **4.250.950.330,00** atau **77,52%** dari anggaran sebesar **5.484.021.000,00** yang digunakan untuk :

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.129.450.588,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.016.169.742,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	105.330.000,00
	Jumlah	4.250.950.330,00

- Belanja pegawai yang tidak berkaitan dengan program dan kegiatan yaitu pembayaran gaji dan tunjangan PNS.
- Belanja pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim

Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber, Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap, dan uang lembur.

Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp3.704.587.359,00** atau sebesar **86,93%** dari anggaran sebesar **Rp4.261.724.109,00** yang digunakan untuk:

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Barang	1.048.660.039,00
2.	Belanja Jasa	1.830.100.391,00
3.	Belanja Pemeliharaan	224.309.235,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	570.517.694,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.000.000,00
	Jumlah	3.704.587.359,00

- Belanja barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan seperti pembelian bahan pakai habis kantor, belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana dan belanja makanan minuman.
- Belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam dan luar daerah.
- Belanja pemeliharaan digunakan untuk membiayai kondisi aset tetap yang dimiliki agar sesuai dengan kondisi normal seperti perawatan rutin kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin bangunan kantor dan perlengkapan kantor.

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pos pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Uraian Belanja	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.690.000,00	417.940.000,00	94,84	121.646.010,00
2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.200.000,00	0,00	0,00	121.646.010,00
3.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	226.660.000,00	206.140.000,00	90,95	0,00
4.	Belanja Modal Komputer	212.830.000,00	211.800.000,00	99,52	0,00
	Jumlah	440.690.000,00	417.940.000,00	94,84	121.646.010,00

3.1.3 Pendapatan LO

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, Sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp7.931.914.079,00 dan per 31 Desember 2022 pendapatan LO sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban sebesar Rp10.935.467.311,00 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar Rp3.003.553.232.

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
Beban	7.931.914.079	10.935.467.311	(3.003.553.232)	(27,47)
Beban Pegawai	4.250.950.330,00	4.493.643.624,00	(242.693.294,00)	(5,40)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.450.588,00	2.178.600.133,00	(49.149.545,00)	(2,26)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.016.169.742,00	2.255.443.491,00	(239.273.749,00)	(10,61)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	105.330.000,00	59.600.000,00	45.730.000,00	76,73

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)	KENAIKAN/ PENURUNAN (Rp)	%
Objektif Lainnya ASN				
Beban Barang dan Jasa	3.680.963.749,00	5.851.196.212,00	(2.170.232.463,00)	(37,09)
Beban Barang	1.032.259.309,00	972.114.743,00	60.144.566,00	6,19
Beban Jasa	1.822.877.511,00	3.667.478.482,00	(1.844.600.971,00)	(50,30)
Beban Pemeliharaan	224.309.235,00	511.597.065,00	(287.287.830,00)	(56,16)
Beban Perjalanan Dinas	570.517.694,00	700.005.922,00	(129.488.228,00)	(18,50)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.000.000,00	0	31.000.000,00	100,00
JUMLAH BEBAN OPERASI	7.931.914.079,00	10.344.839.836,00	(2.412.925.757,00)	(23,32)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	336.413.577,00	590.627.475,23	(254.213.898,23)	(43,04)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334.704.852,00	500.495.766,90	(165.790.914,90)	(33,13)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	88.422.983,33	(88.422.983,33)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.708.725,00	1.708.725,00	0,00	0,00
JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	336.413.577,00	590.627.475,23	(254.213.898,23)	(43,04)
JUMLAH BEBAN	8.268.327.656,00	10.935.467.311,23	(2.667.139.655,23)	(24,39)
SURPLUS/DE FISIT-LO	(8.268.327.656,00)	(10.935.467.311,23)	2.667.139.655,23	(24,39)

Beban LO terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Operasi terdiri dari beban beban sebagai berikut ini :

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Beban Pegawai	4.250.950.330,00
2.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	2.129.450.588,00
3.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.016.169.742,00
4.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.330.000,00
5.	Beban Barang dan Jasa	3.680.963.749,00
6.	Beban Barang	1.032.259.309,00
7.	Beban Jasa	1.822.877.511,00
8.	Beban Pemeliharaan	224.309.235,00
9.	Beban Perjalanan Dinas	570.517.694,00
10.	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.000.000,00
	Jumlah	7.931.914.079,00

Beban Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari beban beban sebagai berikut ini

:

No.	Uraian Beban	Jumlah (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	334.704.852,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	88.422.983,33
3.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.708.725,00
	Jumlah	424.836.560,33

3.1.4 ASET

Aset Lancar

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran. Nilai kas

per 31 Desember 2022 sebesar Rp0, yang merupakan kas di bendahara pengeluaran – Bank sesuai saldo rekening koran per 31 Desember 2023

- Persediaan

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Bappeda Kabupaten Nganjuk. Nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp335.500,00 yang terdiri dari :

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Alat-alat listrik dan elektronik	335.500,00
	Jumlah	335.500,00,00

dan nilai persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.736.230,00 (Stock Opname terlampir) yang terdiri dari :

No.	Uraian Belanja	Jumlah (Rp)
1.	Alat Tulis Kantor	5.765.500,00
2.	Kertas dan Cover	2.040.000,00
3.	Bahan Cetak	6.050.000,00
4.	Benda Pos	450.000,00
5.	Perabot Kantor	2.430.730,00
	Jumlah	16.736.230,00

Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Yang menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari:

- Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

- Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan untuk mendapatkan deviden atau menanamkan pengaruh yang signifikan. Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.962.676.147,67 sedangkan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.670.036.708.

No.	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1.	Tanah	0,00	0,00
2.	Peralatan dan Mesin	5.200.758.454	6.698.805.829,00
3.	Gedung dan Bangunan	2.744.638.700	2.744.638.700,00
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	34.174.500	34.174.500,00
5.	Aset Tetap Lainnya	144.100.600	144.100.600,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7.	Akumulasi Penyusutan	(6.160.996.106,33)	(6.951.682.921,00)
	Jumlah	1.962.676.147,67	2.670.036.708,00

- Tanah

Nilai tanah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Tetap, yaitu Rp0,00. Hal ini dikarenakan tanah yang ditempati Bappeda Kabupaten Nganjuk yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rakmat Nomor 1 Nganjuk, merupakan tanah aset milik Pemkab Nganjuk sehingga tidak tercatat dalam Neraca Bappeda Kabupaten Nganjuk.

- Peralatan dan Mesin

Nilai peralatan dan mesin Per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.698.805.829,00 sedangkan per 31 Desember 2023 berkurang menjadi Rp5.200.758.454. Hal ini dikarenakan di Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tahun 2023 ada Belanja modal senilai Rp417.940.000,00 yang terdiri dari 2 unit interactive display, 7 unit laptop, 2 unit printer, 1 unit interactive panel, 2 unit monitor PC. dan terdapat mutasi keluar/ penyerahan Barang Milik Daerah ke Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk senilai Rp1.915.987.375 yang terdiri dari 5 unit kendaraan dinas roda empat.

- Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.744.638.700,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.744.638.700,00, tidak ada perubahan untuk nilai Gedung dan Bangunan adalah tetap.

- Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp34.174.500,00.

- Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp144.100.600,00. dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.100.600,00. tidak ada perubahan untuk nilai aset tetap lainnya adalah tetap.

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.160.996.106,33. Dengan rincian seperti tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.363.821.698,00
2.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.771.985.883,33
3.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.188.525,00
	Jumlah	6.160.996.106.33

Aset Lainnya

Aset lainnya di Bappeda Kabupaten Nganjuk adalah aset tetap yang diusulkan untuk di hapus, jumlah aset lainnya Bappeda Kabupaten Nganjuk per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00

3.1.5 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek yang wajib dibayar Bappeda Kabupaten Nganjuk sebesar **Rp. 8.282.412,00** yang berasal dari Utang Beban terdiri dari:

- a. Kewajiban atas tagihan telepon bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp 162.111,00
- b. Tagihan Jasa Listrik bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp7.660.885,00
- c. Tagihan Jasa Internet bulan Desember Tahun 2023 sebesar Rp459.416,00

Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah kewajiban jangka panjang Bappeda Kabupaten Nganjuk sebesar Rp0,0

3.1.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah total aset dikurangi jumlah kewajiban. Jumlah ekuitas dana Bappeda Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	2.654.866.916,00	3.198.079.922,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.356.750.639)	(10.935.467.311,00)
RK PPKD	8.373.477.689,00	10.392.254.305,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	(700.464.000,00)	(0,00)
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		
R/K PPKD	8.373.477.689,00	10.392.254.305,00
EKUITAS AKHIR	2.059.552.949,00	2.654.866.916,00

Pengungkapan Perbedaan Beban-LO Dengan Belanja-LRA

Pengungkapan perbedaan beban LO dengan belanja LRA adalah sebagai berikut:

Belanja LRA sebesar	Rp, 8.373.477.689,00,-
Beban LO sebesar	<u>Rp 8.356.750.639,33-</u>
Selisih	(Rp16.727.050,00,-)

Selisih berasal dari:

Beban:

▪ Persediaan Tahun 2022	Rp (335.500,00,)
▪ Kewajiban 2023	Rp (8.282.412,00,)
▪ Beban penyusutan 2023	Rp (424.836.560,23)
▪ Persediaan Tahun 2023	Rp 16.736.230,00,-
▪ Kewajiban 2022	Rp 15.505.292,00,-
▪ Belanja Modal Peralatan dan mesin	Rp 417.940.000,00,-

Jumlah Beban (Rp 16.727.050,00,-)

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

4.1 Domisili dan Bentuk Badan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk terletak di jalan Jenderal Basuki Rakmat Nomor 1 Nganjuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016.

4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Sesuai Lampiran Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021, Bappeda Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah, mempunyai tugas pokok penyusunan dan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

b. Fungsi

- perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- perumusan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- pengordinasian penyusunan rencana pembangunan daerah;
- penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- pembinaan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang
- perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

4.3 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyesuaikan aturan tersebut yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk dibantu Sekretaris, Kepala Bidang, Subbidang, sebagaimana Susunan Tata Kerja dibawah ini :

- a. Sekretariat
 1. Sekretaris;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Perencanaan ;
 4. Sub Bagian Keuangan.

- b. Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah)
 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 2. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 3. Subbidang Data dan Informasi
 4. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- c. Bidang II (Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)
 1. Kepala Bidang Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan
 2. Subbidang Perencanaan Pemerintahan Umum
 3. Subbidang Perencanaan Pemerintahan Daerah
 4. Subbidang Perencanaan Pembangunan Manusia

- d. Bidang III (Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan)
 1. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, dan Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
 2. Subbidang Perencanaan Bidang Perekonomian;
 3. Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Kewilayahan dan Sumber Daya Alam
 4. Subbidang Perencanaan Infrastruktur

e. Bidang IV (Bidang Penelitian Dan Pengembangan)

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan.
3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4. Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan atas sumber daya yang dipercayakan, semoga informasi yang disajikan dapat dimanfaatkan oleh para pengguna Laporan Keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Nganjuk, 18 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN NGANJUK

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640311 199303 1 012



PEMERINTAHAN KAB. NGANJUK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	$5 = \frac{4}{3} * 100$	6
5	BELANJA DAERAH	10.186.435.109	8.373.477.689,00	82,20	10.392.254.305,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.745.745.109	7.955.537.689,00	81,63	10.270.608.295,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.484.021.000	4.250.950.330,00	77,52	4.493.643.624,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.261.724.109	3.704.587.359,00	86,93	5.776.964.671,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	9.745.745.109	7.955.537.689,00	81,63	10.270.608.295,00
5.2	BELANJA MODAL	440.690.000	417.940.000,00	94,84	121.646.010,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.690.000	417.940.000,00	94,84	121.646.010,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	440.690.000	417.940.000,00	94,84	121.646.010,00
	JUMLAH BELANJA	10.186.435.109	8.373.477.689,00	82,20	10.392.254.305,00
	SURPLUS/DEFISIT	(10.186.435.109)	(8.373.477.689,00)	82,20	(10.392.254.305,00)

Kab. Nganjuk, 18 Januari 2024
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
NIP. 196403111993031012

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



PEMERINTAHAN KAB. NGANJUK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2023



1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
1	ASET	1.979.412.377,67	2.670.372.208,00
1.1	ASET LANCAR	16.736.230,00	335.500,00
1.1.12	Persediaan	16.736.230,00	335.500,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	16.736.230,00	335.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR	16.736.230,00	335.500,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	1.962.676.147,67	2.670.036.708,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	5.200.758.454,00	6.698.805.829,00
1.3.02.01	Alat Besar	4.350.000,00	4.350.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	2.029.696.424,00	3.945.683.799,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	853.027.760,00	853.027.760,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	533.172.800,00	327.032.800,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	14.250.000,00	14.250.000,00
1.3.02.10	Komputer	1.766.261.470,00	1.554.461.470,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	2.744.638.700,00	2.744.638.700,00
1.3.03.01	Bangunan Gedung	2.744.638.700,00	2.744.638.700,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	34.174.500,00	34.174.500,00
1.3.04.03	Instalasi	6.574.500,00	6.574.500,00
1.3.04.04	Jaringan	27.600.000,00	27.600.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	144.100.600,00	144.100.600,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	144.100.600,00	144.100.600,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(6.160.996.106,33)	(6.951.682.921,00)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.363.821.698,00)	(5.244.640.221,00)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.771.985.883,33)	(1.683.562.900,00)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(25.188.525,00)	(23.479.800,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.962.676.147,67	2.670.036.708,00
		0,00	0,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.979.412.377,67	2.670.372.208,00
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	8.282.412,00	15.505.292,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.282.412,00	15.505.292,00
2.1.06	Utang Belanja	8.282.412,00	15.505.292,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.282.412,00	15.505.292,00

Kode Rekening	Uraian	2023	2022
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.282.412,00	15.505.292,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	8.282.412,00	15.505.292,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	1.971.129.965,67	2.654.866.916,00
3.1	EKUITAS	1.971.129.965,67	2.654.866.916,00
3.1.01	Ekuitas	(6.402.347.723,33)	(7.737.387.389,00)
3.1.01.01	Ekuitas	1.954.402.916,00	3.198.079.922,23
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(8.356.750.639,33)	(10.935.467.311,23)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	8.373.477.689,00	10.392.254.305,00
3.1.03.01	RK PPKD	8.373.477.689,00	10.392.254.305,00
	JUMLAH EKUITAS	1.971.129.965,67	2.654.866.916,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.979.412.377,67	2.670.372.208,00

Kab. Nganjuk, 12-01-2024
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

Ir. FADJAR JUDIONO, M.Si
NIP. 196403111993031012

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri